BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan studi kasus *Public Relations on the net* pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan yakni melalui *website* Bagian Humas dan Protokol dapat memberikan informasi secara menyeluruh dan detail mengenai kegiatan resmi yang difasilitasi Humas dan Protokol. Dengan adanya penggunaan *website* DPRD Jawa Barat dijadikan Bagian Humas dan Protokol sebagai sarana publikasi yang cepat di kalangan wartawan yang dapat mengganti kelemahan media publikasi konvensional (lembaran *press release*, papan pengumuman, dan majalah dinding) yang dahulu digunakan Bagian Humas dan Protokol, karena dengan tuntutan era globalisasi dibutuhkan kecepatan dalam penyampaian informasi. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan hanya sebatas pemberitahuan mengenai kegiatan yang

akan dan telah dilakukan dewan secara resmi kelembagaan. Selain itu, dijadikan sebagai pencarian data tambahan dan data pendukung untuk menarik isu dalam pembuatan beritanya yang berkaitan dengan DPRD Jawa Barat.

2. Efisiensi penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan memberikan ketepatan cara, kepraktisan, dan penghematan dari segi waktu serta biaya untuk menjangkau sasaran yang lebih luas dengan informasi yang menyeluruh pada satu portal. Dengan tersedianya dua portal yang dapat diakses secara bersamaan mengurangi proses kerja dari sisi waktu. Aplikasi yang selalu berjalan dengan baik, seperti CMS (*Content Management System),* memudahkan staf Humas dan Protokol untuk menambahkan dan mengubah isi dari situs *website* DPRD Jawa Barat, sehingga dapat memberikan informasi secara detail dan menyeluruh dari kegiatan dewan yang difasilitasi Humas. Dengan memafaatkan fasilitas yang dimiliki kalangan wartawan mendapatkan informasi pada *website* DPRD Jawa Barat secara cepat, mudah, dan murah.
3. Partisipasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan, tidak dilakukan dalam bentuk apapun, baik memberikan tanggapan melalui menu Kirim Aspirasi atau pengisian berita pada *website* DPRD Jawa Barat oleh kalangan wartawan. Hanya saja partisipasi kalangan wartawan lebih memberikan masukan kepada Bagian Humas dan

Protokol sebatas teknis pengelolaan informasi dalam penggunaan *website* DPRD Jawa Barat yang terkadang belum ter*update* dan ada permasalahan dalam pengaksesan informasi dalam *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id.

4. Transparansi Informasi pada penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan telah dibatasi kebijakan instansi dan dewan, serta Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana informasi yang dimiliki badan publik wajib terbuka dan masyarakat serta pengguna informasi wajib mengetahui. Namun terdapat pula pengecualian pada informasi badan publik yang dapat dirahasiakan tidak di informasikan kepada masyarakat dan pengguna informasi. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat menyiarkan informasi yang terbuka hanya dari kegiatan resmi dewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan fakta dilapangan. Bagi Kalangan wartawan keterbukaan informasi tidak hanya memberikan informasi seputar kegiatan yang dilakukan dewan saja, meskipun kegiatan yang dilakukan dewan di lapangan sesuai dengan informasi pada *website* DPRD Jawa Barat. Namun, kalangan wartawan lebih menginginkan transparansi informasi melalui berita dalam *website*, yang lebih menyoroti dewan menindaklanjuti permasalahan yang berada di masyarakat sesuai dengan pelaksanaan perda yang telah disahkan. Seperti, informasi dewan menanggapi aspirasi masyarakat hingga menanggapi kritikan masyarakat

tentang kinerja Pemerintah Daerah maupun kinerja dewan sendiri. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk berita atau artikel dalam *website* DPRD Jawa Barat, sehingga pemberitaan tidak monoton yang hanya menyoroti kegiatan resmi dewan. Selain itu, transparansi informasi dalam *website*, terutama pemberitaan juga menurut kalangan wartawan harus dapat menyoroti penyelesaian masalah dari suatu *political issue* dan isu-isu negatif tentang DPRD.

5. Manajemen perubahan penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan dalam pengembangannya *website* DPRD Jawa Barat dikelola oleh pihak luar yang berkemampuan dibidang IT *(Information Tecnology)* untuk *maintanence* dari *software* dan jaringan. Namun, pihak dalam tetap memiliki kewenangan untuk menggunakan *website* DPRD Jawa Barat, yakni Bagian Humas dan Protokol yang dalam hal pengelolaan konten isi dari aplikasi yang ada. Praktik *Public Relations on the net* yang menggunakan sistem *E-Government* diperlukan adanya monitoring dan kontrol yang ketat. Proses tersebut dilaksanakan setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Proses monitoring dan kontrol yang dilakukan meliputi: *update* agenda kegiatan dewan dan berita, pengolahan input aspirasi dari menu aspirasi yang dijadikan laporan bulanan, dan pengontrolan *software* dan jaringan setiap dua kali seminggu.
6. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan ini, selain dituntut

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, tetapi didasarkan oleh kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Barat sebagai saran sosialisasi kegiatan dan fasilitas dewan yang cepat dan langsung diterima masyarakat. Hal ini, digunakan pula oleh Bagian Humas dan Protokol untuk melengkapi sarana publikasinya agar dapat mempercepat dan memudahkan penyampaian informasi di kalangan wartawan. *Website* DPRD Jawa Barat menggunakan internet dapat memberikan kemudahan dibandingkan media konvensional dalam penyebaran informasi. Penggunaan *website* DPDR Jawa Barat dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan, hanya sebatas penunjang data pendukung dalam pencarian bahan berita yang berasal dari Agenda kegiatan dewan dan *press release* dalam bentuk berita matang. Penggunaan *website* DPRD Jawa Barat bagi kalangan wartawan merupakan sarana yang baik dalam mendapatkan informasi seputar kegiatan resmi dewan, karena mudah, cepat, dan lebih praktis dalam pengaksesan data.

5.2 Saran

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti harus mampu memberikan suatu masukan berupa saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1. Sebaiknya pengunaan *website* DPRD Jawa Barat dalam penyampaian informasi di kalangan wartawan tidak hanya sebatas agenda kegiatan

dewan dan berita ekspose kegiatan dewan secara resmi. Namun, pemanfaatan aplikasi lain juga diperlukan, seperti aplikasi galeri foto kegiatan yang selalu diperbaharui, pengaktifan aplikasi jajak pendapat, dan Peraturan dan Perundangan yang harus diperbaharuhi, karena dapat membantu wartawan dalam penambahan bahan berita.

2. Pemberitaan dalam *website* DPRD Jawa Barat sebaikya lebih dapat menyoroti penidaklanjutan dewan terhadap kritikan dan masukan dari masyarakat, sehingga beritanya tidak monoton mengenai kegiatan dewan yang berupa rapat, kunjungan kerja, serta penerimaan atau menghadari beberapa undangan.
3. Sebaiknya *updating* informasi dilakukan setiap hari oleh Bagian Humas dan Protokol dalam *website* DPRD Jawa Barat, sehingga tidak terjadi anggapan negatif dari kalangan wartawan mengenai informasi yang telat.
4. Perlu peningkatan serta pemberdayaan kemampuan dan pengetahuan baik di bidanh teknis penggunaan *website* DPRD Jawa Barat, maupun keterampilan pembuatan *press release* dalam bentuk berita matang sesuai kaidah jurnalistik bagi para seluruh Staf Bagian Humas dan Protokol, sehingga dapat dibentuk tim operator yang mengelola pembuatan jadwal agenda, berita, serta pengontrolan untuk *update* informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan teknis tidak *update* informasi.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi ilmu komunikasi bidang kajian kehumasan.